

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Kabupaten Tanah Laut

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ibukota kabupaten yang terletak di kota Pelaihari. Secara geografis Kabupaten Tanah Laut terletak pada posisi $114^{\circ}30'20$ BT - $115^{\circ}23'31$ BT dan $3^{\circ}30'33$ LS - $4^{\circ}11'38$ LS dengan luas wilayah 3.631,35 KM², yang terbagi atas 9 kecamatan dan 133 desa.

Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi berbagai objek dan daya tarik wisata, diantaranya wisata alam, wisata buatan, dan wisata religi. Di Kabupaten Tanah Laut banyak terdapat sektor pariwisata karena letaknya berbatasan langsung dengan laut Jawa, maka tidak heran jika Kabupaten Tanah Laut pantailah sebagai objek wisata andalan nya. Adapun sektor pariwisata yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut diantaranya :

a. Wisata Alam

Tabel 4.1

NO.	Nama Objek Wisata	Lokasi Wisata
1.	Pantai Takisung	Takisung, Kec. Takisung
2.	Pantai Batakan	Batakan, Kec. Penyipatan
3.	Pantai Batu Lima	Kuala Tambangan, Kec. Takisung
4.	Pantai Swarangan	Swarangan, Kec. Jorong
5.	Pantai Kintap	Muara Kintap, Kec. Kintap

6.	Pantai Cemara Satu	Muara Kintap, Kec. Kintap
7.	Pantai Cemara Dua	Muara Kintap, Kec. Kintap
8.	Pantai Tanjung Dewa	Tanjung dewa, Kec. Penyipatan
9.	Pantai Karindangan	Pagatan Besar, Kec. Takisung
10.	Pantai Turki	Tungkaran Naik, Kec. Jorong
11.	Pantai Asmara	Muara Asam-asam, Kec. jorong
12.	Gunung kayangan	Ambungan, Kec. Pelaihari
13.	Gunung birah	Kandangan Lama, Kec. Penyipatan
14.	Air Terjun Bajuin	Sungai Bakar, Kec. Bajuin

Sumber : Data Diolah 2022

b. Wisata Buatan

Tabel 4.2

No.	Nama Objek Wisata	Letak Objek Wisata
1.	Taman Minatirta	Angsau, Kec. Pelaihari
2.	Taman Permana	Bekatung, Kec. Pelaihari
3.	Wisata Mahuni	Padang, Kec. Bati-bati
4.	Mangrove Pagatan Besar	Pagatan Besar, Kec. Takisung
5.	Kerbau Rawa	Benua Raya, Kec. Bati-bati

Sumber: Data Diolah 2022

c. Wisata Religi

Tabel 4.3

No.	Nama Objek Wisata	Letak Objek Wisata
1.	Pulau Datu	Tanjung dewa, Kec. Penyipatan

Sumber : Data Diolah 2022

2. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

a. Visi

Terwujud nya Tanah Laut yang berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius Aktual, dan Sinergi.

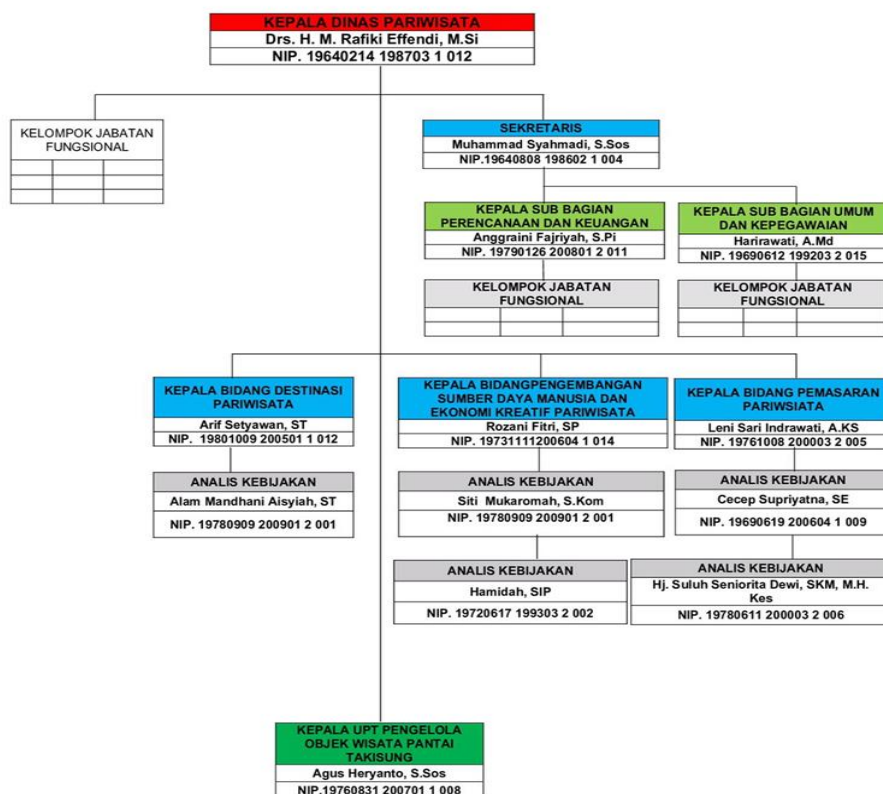
b. Misi

Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 114 TAHUN 2021
TANGGAL : 13 Desember 2021



4. Identitas Informan

- a. Nama : Drs. H. M. Rafiki Effendi, M.Si
 Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14-02-1964
 Pendidikan Terakhir : S2
 Pekerjaan/Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata
- b. Nama : Arif Setyawan, ST
 Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 09-10-1980
 Pendidikan Terakhir : S1
 Jabatan : Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
- c. Nama : Leni Sari Indrawati, A. KS
 Tempat/Tanggal Lahir : Pelaihari, 08-10-1976
 Pendidikan Terakhir : D4
 Jabatan : Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
- d. Nama : Siti Mukaromah, S.Kom
 Tempat/Tanggal Lahir : Kintap, 19-08-1987
 Pendidikan Terakhir : S1
 Jabatan : Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan
 dan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi
 Kreatif Pariwisata

5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang

kepariwisataan dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.dengan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata
- 2) Pelaksanana kebijakan teknis bidang pariwisata
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas
- 5) Pembinaan UPTD dinas
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Penyajian Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan teknik observasi, wawancara serta dokumen, maka langkah selanjutnya ialah penyajian data, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan yaitu :

1. Pengembangan sektor pariwisata oleh dinas pariwisata Kabupaten Tanah Laut

Menurut hasil wawancara dengan bapak Drs. H.M. Rafiqi Effendi, M.Si pada tanggal 31 Januari 2022 sebagai kepala dinas pariwisata Kabupaten Tanah Laut, secara resmi Dinas Pariwisata hanya mengelola tujuh objek wisata, selebihnya di kelola oleh masyarakat maupun pihak swasta. Adapun objek wisata yang di kelola oleh Dinas Pariwisata yaitu :

Tabel 4.4

No	Nama Objek Wisata	Letak Objek Wisata
1.	Pantai Batakan	Batakan, Kec. Penyipatan

2.	Pantai Takisung	Takisung, Kec. Takisung
3.	Pantai swarangan	Swarangan, Kec. Jorong
4.	Air Terjun Bajuin	Sungai Bakar, Kec. Bajuin
5.	Pantai Batu Lima	Kuala Tambangan, Kec. Takisung
6.	Gunung Kayangan	Ambungan, Kec. Pelaihari
7.	Taman Minatirta	Angsau, Kec. Pelaihari

Sumber data: Dinas Pariwisata 2022

Program dan kegiatan pengembangan sektor pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut ini dilakukan melalui 3 bidang yaitu Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata, dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata. Pengembangan serta pengelolaan sektor pariwisata dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang nya masing-masing.

a. Bidang Destinasi Pariwisata

Bidang Destinasi memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang destinasi pariwisata
- 2) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria bidang destinasi pariwisata dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku

- 3) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan fasilitasi destinasi pariwisata;
- 4) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan fasilitasi destinasi pariwisata;
- 5) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi pengembangan sarana dan prasarana pariwisata;
- 6) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan sadar wisata daerah;
- 7) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi pengembangan pariwisata daerah;
- 8) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang destinasi pariwisata; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata yaitu Bapak Arif Setyawan, ST. Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata melalui bidang Destinasi Pariwisata terkait dengan pengembangan sektor pariwisata ialah penggalan potensi objek wisata. Contohnya ada nya objek wisata baru, maka tugas dari dinas pariwisata melalui bidang destinasi wisata mencoba

mengembangkan objek wisata tersebut. Adapun untuk objek wisata yang sudah ada pengembangan dilakukan bidang destinasi ialah dengan cara melengkapi fasilitas serta sarana prasarana yang ada di objek wisata berupa :

- a) Penyediaan Lahan Parkir
- b) Penyediaan musholla
- c) Penyediaan Air bersih
- d) Penyediaan MCK
- e) Perbaikan Jalan
- f) Penyediaan pandopo dan gajebo
- g) Pembuatan tempat kuliner

Bidang Destinasi Pariwisata juga melaksanakan kegiatan monitoring dan pembinaan Pokdarwis di beberapa objek wisata yang dikelola oleh masyarakat maupun swasta, monitoring dan pembinaan Pokdarwis ini rutin dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut tujuan dari kegiatan ini ialah supaya para pokdarwis yang ada ikut aktif dan berperan dalam memajukan dan mengembangkan sektor pariwisata yang mereka kelola agar lebih diminati masyarakat maupun wisatawan untuk berkunjung.

b. Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pemasaran pariwisata berdasarkan Rencana Strategis Dinas;

- 2) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemasaran pariwisata dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- 3) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan informasi kepariwisataan daerah;
- 4) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penggalan dan pengkajian potensi pasar serta perluasan jaringan pemasaran pariwisata daerah;
- 5) Menyusun program mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi pengembangan hubungan antar lembaga dalam pengembangan pemasaran pariwisata daerah;
- 6) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan serta pertemuan antar pelaku dunia usaha pariwisata;
- 7) Melaksanakan upaya pengembangan pemasaran pariwisata;
- 8) Merancang dan mensinergikan pembuatan even-even untuk meningkatkan kunjungan;
- 9) Meningkatkan kemitraan pengembangan produk dan promosi;
- 10) Meningkatkan pembangunan sistem informasi pelayanan kepariwisataan;

- 11) Menyusun rencana kegiatan bidang pemasaran sesuai dengan rencana dinas;
- 12) Meningkatkan koordinasi pengembangan jaringan aksesibilitas;
- 13) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang; dan
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas pariwisata Kabupaten Tanah Laut juga melalui bidang pemasaran melakukan pengembangan sektor pariwisata dengan promosi, yaitu mempromosikan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut melalui *event-event* seperti Batakan *colorfun*, festival drone dan lain sebagainya, juga melalui pameran-pameran yang diikuti baik didalam maupun luar daerah, selain itu juga kegiatan promosi dilakukan melalui media sosial, media elektronik, media cetak maupun media lain nya. (Wawancara Ibu Leni/Kepala Bidang Pemasaran wisata).

c. Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif

Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang usaha jasa pariwisata berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
- 2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur

dan kriteria bidang usaha jasa pariwisata dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

- 3) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan fasilitasi usaha jasa pariwisata;
- 4) Menyusun program dan melaksanakan pembinaan usaha jasa pariwisata;
- 5) Merumuskan bahan dan memberikan rekomendasi ijin usaha pariwisata;
- 6) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang usaha jasa pariwisata; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi kreatif, dimana bidang ini melakukan pengembangan sektor pariwisata dengan menagadakan pelatihan-pelatihan kepariwisataan serta sosialisasi tentang kepariwisataan kepada masyarakat disekitar objek wisata, dan memberikan pembinaann untuk pelaku ekonomi kreatif terutama mereka yang produk nya dijual di objek wisata, sehingga para wisatawan yang berkunjung bukan hanya sekedar berwisata tetapi mereka juga bisa berbelanja.

Salah satu kegiatan pelatihan atau kegiatan yang dilaksanakan Bidang destinasi pengembangan sumber dayan manusia dan ekonomi kreatif ialah kegiatan Bimtek Tour Guide, melalui bimtek ini diharapkan sektor pariwisata di

Tanah Laut memiliki Sumber daya manusia yang unggul dalam hal kerpariwisataan di Tanah Laut. Selain itu juga diharapkan tour guide/pemandu wisata yang ada di Tanah Laut tidak hanya berorientasi kepada wisatawan tetapi juga peduli terhadap lingkungan, sosial dan budaya mengingat sektor pariwisata yang ada di Tanah Laut masih banyak yang berbasis alam. (wawancara dengan Ibu Siti Mukaromah, bidang SDM dan Ekonomi kreatif 31 Januari 2022)

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Laut dari Sektor Pariwisata

Pendapatan Asli Daerah disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Besaran kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli Kabupaten Tanah Laut tergolong cukup besar, hal ini disebabkan karena banyaknya pengunjung yang datang ke objek wisata. Kontribusi yang berasal dari Sektor pariwisata berupa tiket masuk, lahan parkir, dan sewa kios pedagang. (Wawancara dengan bapak Arif Setywan, ST Kepala Bidang Destinasi Pariwisata)

Berikut realisasi jumlah kunjungan wisata serta realisasi jumlah pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata dari tahun 2019-2021 sebagai berikut

Table. 4.4
Jumlah kunjungan wisata dan Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisata	Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata
2019	346,366	625,351,500
2020	330,241	1,283,708,000
2021	193,671	614,265,000

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

Pendapatan Asli daerah yang berasal dari sektor pariwisata di tahun 2019-2020 mengalami peningkatan yaitu di tahun 2019 dengan jumlah 625,351,500 sedangkan tahun 2020 dengan jumlah 1,283,708,000. Akan tetapi di tahun 2021 mengalami penurunan pendapatan, yaitu dengan jumlah 614,265,000 faktor utama penyebab penurunan pendapatan ini ialah masa pandemi covid-19 yang berdampak pada beberapa kali objek wisata ditutup karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah daerah.

3. Kendala dalam pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Tanah Laut

Kendala yang dialami oleh Dinas Pariwisata untuk mengembangkan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut ialah kondisi jalan menuju objek wisata kurang memadai, memang jalan menuju objek wisata sudah terbilang cukup bagus namun ada beberapa titik yang jalannya masih rusak, bukan berarti pemerintah daerah tidak melakukan perbaikan jalan, akan tetapi pemerintah daerah tidak bisa memberi akses perbaikan jalan dikarenakan daerah yang status lahannya milik perusahaan, hutan lindung, dan suaka margasatwa. (Wawancara dengan Ibu Leni sari. A.Ks Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata)

Serta juga terkendala oleh pendanaaan yang minim sehingga dinas pariwisata tidak dapat mengembangkan secara maksimal. Ketika dinas pariwisata ingin mengembangkan sektor pariwisata dengan melengkapi fasilitas-fasilitas dan sarana prasarana yang ada di objek wisata, tetapi terkendala oleh dana yang terbatas. (Wawancara dengan bapak Arif Setywan, ST Kepala Bidang Destinasi Pariwisata)

Kurangnya kesadaran Sumber daya manusia tentang dampak keparwisataan ini, karena Dinas pariwisata cuman bisa membina, sedangkan masyarakat disekitaran objek wisata lah pelaku keparwisataan secara langsung. Pelaku keparwisataan itu bukan hanya Dinas Pariwisata dan masyarakat saja melainkan pelaku industri makanan, dan industri perhotelan juga memiliki peran penting untuk kemajuan dan perkembangan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dinas Pariwisata berharap orang yang datang ketempat wisata bukan cuman sekedar datang langsung pulang, melainkan semakin lama wisatawan tinggal di Kabupaten Tanah Laut itu menjadi nilai tambah bagi Dinas Pariwisata. Maka dari itu pelaku keparwisataan bukan cuman dari Dinas Pariwisata dan masyarakat sekitaran sektor pariwisata saja, melainkan sektor-sektor pendukung nya seperti industri perhotelan, dan industri makanan juga memiliki peran penting. Jadi Sumber daya manusia juga menjadi salah satu kendala dalam pengembangan sektor pariwisata. (wawancara dengan Ibu Siti Mukaromah, bidang SDM dan Ekonomi kreatif 31 Januari 2022)

C. Analisis Data

1. Analisis Pengembangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Dalam pengelolaan sektor pariwisata tentunya membutuhkan suatu perencanaan dan strategi yang matang agar sektor pariwisata yang dikelola dapat memberikan dampak positif baik bagi daerah maupun bagi masyarakat. Pengembangan sektor pariwisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat agar dapat memberikan dampak positif bagi daerah maupun bagi masyarakat. Adapun hal –hal yang perlu diperhatikan tersebut adalah :

1. Strategi Pengembangan Wisata

Strategi dalam penyelenggaraan pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

a. Promosi

Promosi merupakan suatu upaya pemasaran untuk memperkenalkan sektor pariwisata disuatu daerah. Promosi dapat dilakukan melalui media elektronik maupun media masa. Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut yaitu mempromosikan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut melalui *event-event* seperti Batakan *colorfun*, festival drone dan lain sebagai nya, juga melalui pameran-pameran yang diikuti baik didalam maupun luar daerah, selain itu juga kegiatan promosi dilakukan melalui media sosial, media elektronik, media cetak maupun media lain nya.

b. Akseibilitas

Akses yang dimaksud adalah keadaan jalan menuju objek wisata. Untuk semakin menarik para wisatawan berkunjung, maka pemerintah harus menyediakan akses yang mudah menuju objek wisata. Menurut wawancara dengan Dinas Pariwisata mengenai akses jalan menuju sektor pariwisata, kondisi jalan menuju objek wisata kurang memadai, memang jalan menuju objek wisata sudah terbilang cukup bagus namun ada beberapa titik yang jalannya masih rusak.

c. Kawasan pariwisata

Kawasan pariwisata dikembangkan dengan meningkatkan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan. Termasuk dalam upaya pengembangan sarana prasarana. Peran Dinas Pariwisata dalam mengembangkan sarana prasarana yang ada di sektor pariwisata ialah sudah ada beberapa fasilitas yang tersedia di sektor pariwisata yakni lahan Parkir, tempat ibadah, Air bersih, MCK, pandopo dan gajebo.

d. Jenis wisata

Jenis pariwisata menawarkan berbagai macam jenis pariwisata dengan keindahan yang dimiliki. Seperti wisata bahari, pegunungan, budaya, dan lainnya, yang berperan penting dalam menarik minat wisatawan. Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi objek dan daya tarik wisata yang beragam, diantaranya wisata

alam, seperti pantai, gunung, dan air terjun, sedangkan wisata buatan seperti taman.

e. Produk wisata

Produk wisata yang dimaksud adalah keindahan yang ditawarkan oleh berbagai potensi wisata tersebut. Produk wisata juga dapat mengacu pada produk-produk unggulan khas dari daerah tersebut.. Banyak objek wisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut karena letaknya berbatasan langsung dengan laut Jawa, maka tidak heran jika Kabupaten Tanah Laut pantai sebagai objek wisata andalannya.

f. Sumber daya manusia

Salah satu modal dalam pengembangan pariwisata adalah sumberdaya manusia. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa anggota kelompok sadar wisata. Dinas pariwisata juga melakukan pembentukan pokdarwis(kelompok sadar wisata) di beberapa sektor pariwisata.

2. Teknik Pengembangan pariwisata

Pengembangan suatu pariwisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat, beberapa teknik pengembangan sektor pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1) *Carrying Capacity*
- 2) *Recreational Opportunity Capacity*

- 3) *Recreational Opportunity Spectrum*
- 4) *Limit Of Acceptable Change*
- 5) *Visitor Impact Management Model*
- 6) *Visitor Experienve and Resource Proctection Model*
- 7) *Visitor Activity Management Program*
- 8) *Tourusm Opportunity Spectrum* (I Gede, 2009, hlm. 134)

Berdasarkan hasil penelitian ini teknik yang digunakan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dalam mengembangkan sektor pariwisata nya ialah menggunakan teknik *Carrying capacity*. *Carrying capacity* adalah teknik pengembangan destinasi wisata dengan melihat daya dukung kawasan wisata.

Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut mengembangkan sektor pariwisatanya dengan melihat daya dukung yang dimiliki setiap kawasan sektor wisata, seperti melihat apa saja yang bisa menunjang kegiatan wisata para calon wisatawanannya. Hal ini sesuai dengan konsep pengembangan wisata daerah dengan konsep pendekatan kesesuaian produk pasar yaitu mengembangkan kepariwisataannya yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan mempertimbangkan kemampuan sumber daya alam yang ada, Kabupeten Tanah Laut memiliki potensi objek dan daya tarik wisata yang beragam, diantaranya wisata alam, wisata bahari, dan wisata kuliner. Banyak objek wisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut karena letaknya berbatasan langsung dengan laut Jawa, dan pantai lah yang menjadi objek wisata andalannya. Tentunya dalam mengembangkan sektor pariwisatanya Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut juga memperhatikan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan serta kondisi perekonomian

masyarakat di sekitaran sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tanah Laut selain berdampak terhadap pendapatan asli daerah juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat disekitaran sektor pariwisata.

Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut rutin melakukan pemberdayaan masyarakat disekitaran sektor pariwisata, melalui kegiatan pelatihan seperti kegiatan Bimtek Tour Guide, melalui bimtek ini diharapkan sektor pariwisata di Tanah Laut memiliki Sumber daya manusia yang unggul dalam hal kerpariwisataan di Tanah Laut. selain itu juga diharapkan tour guide/pemandu wisata yang ada di tanah Laut tidak hanya berorientasi kepada wisatawan tetapi juga peduli terhadap lingkungan, sosial dan budaya mengingat sektor pariwisata yang ada di Tanah Laut masih banyak yang berbasis alam.

3. Perencanaan dalam pengelolaan pariwisata

Perencanaan berarti memperhitungkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dimasa yang akan mendatang. Perencanaan dalam pengelolaan sektor pariwisata tujuan nya ialah memenuhi kesejahteraan masyarakat dimasa yang akan datang. Oleh karenanya, pertumbuhan fasilitas, dan kemajuan teknologi dengan penerapannya harus dimasukkan dalam suatu perencanaan.

Dalam perencanaan pengelolaan sektor pariwisata harus mempertimbangkan segala sesuatu yang dapat mendukung kegiatan wisata bagi calon wisatawan. Perimbangan-pertimbangan tersebut diantaranya yakni:

a. Sarana Prasarana dan Fasilitas

Dalam sektor pariwisata hal yang harus diperhatikan adalah sarana-prasarana dan fasilitas apa yang akan diberikan pada calon wisatawan agar mendukung kegiatan wisata para calon wisatawan.

Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut juga memperhatikan perencanaan pengembangan sarana prasarana dan fasilitas penunjang wisata bagi calon wisatawan nya, dengan cara membangun fasilitas-fasilitas khusus kepariwisataan dan prasarana umum untuk mendukung pengembangan rintisan kawasan pariwisata dengan penyediaan :

- 1) Penyediaan Lahan Parkir
- 2) Penyediaan musholla
- 3) Penyediaan Air bersih
- 4) Penyediaan MCK
- 5) Perbaikan Jalan
- 6) Penyediaan pandopo dan gajebo

Namun masih ada beberapa sektor pariwisata yang sarana prasarana nya belum lengkap, hal itu terjadi karna terbatasnya dana anggaran.

b. Perencanaan daya tarik wisata

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keaneka ragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Suatu destinasi wisata tentunya harus memiliki daya tarik

untuk menarik minat wisatawan dan mendorong serta memperbesar arus kunjungan.

Dinas pariwisata Kabupaten Tanah Laut dalam merencanakan daya tarik wisata ialah dengan menumbuhkembangkan daya tarik wisata baru yang potensial dan diminati oleh wisatawan dengan mengadakan promosi yaitu mempromosikan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut melalui pameran-pameran yang diikuti baik didalam maupun luar daerah, selain itu juga kegiatan promosi dilakukan melalui media sosial, media elektronik, media cetak maupun media lainnya, dan mengembangkan produk pariwisata yang berbasis keindahan alam, karena Kabupaten Tanah Laut sendiri punya beberapa alternatif destinasi pariwisata misalkan alam seperti pantai dan gunung, sedangkan buatan seperti taman.

Menurut penulis dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata Dinas Pariwisata telah melakukan pengembangan serta pengelolaan dengan baik. Namun karena terbatasnya dana, dan minimnya SDM kepariwisataan sehingga pengembangan sektor pariwisata belum terlaksana secara maksimal.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Dari beberapa sumber pendapatan asli daerah tersebut, maka penulis dapat menganalisis tentang kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

Tanah Laut. Sektor pariwisata Kabupaten TanahbLaut Termasuk dalam pungutan retribusi jasa umum yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pariwisata.

Penerimaan daerah dalam hal ini sektor pariwisata memiliki peran penting sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Laut. Akan tetapi jumlah retribusi dari sektor pariwisata ini sangat dipengaruhi oleh jumlah pengunjung, semakin besar jumlah pengunjung sektor pariwisata, maka pendapatan dari sektor pariwisata tersebut akan meningkat. Dilain pihak, besar kecilnya jumlah pengunjung sangat di pengaruhi oleh upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola yaitu Dinas Pariwisata terhadap sektor pariwisata.

Untuk mengetahui seberapa besarnya kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Taanah Laut Dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.6

Tahun	PAD Kabupaten Tanah Laut (Rp)	Kontribusi sektor Pariwisata Kabupaten Tanah Laut(Rp)	Kontribusi (%)
2019	169.786.229.529,69	625.351.500	0,36%
2020	189.603.069.628,77	1.283.708.000	0.67%
2021	195.571.380.717,10	614.265.000	0,31%
Jumlah	385.174.450.345,87	2.523.324.500	0,65 %
Rata-rata	256.782.966.897,25	1.261.662.250	0,49%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut 2022 (Data diolah)

Rumus yang digunakan untuk mendapatkan kontirbusi yaitu :

$$= \frac{\text{Realisasi Retribusi}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Tanah Laut pertahunnya rata-rata 0,49% dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah.

Pada tahun 2019 jumlah keseluruhan retribusi dari sektor pariwisata sebesar Rp. 625.351.500 dengan kontribusi sebesar 0,36% dan pada tahun 2020 keseluruhan retribusi dari sektor pariwisata sebesar Rp. 1.283.708.000 dengan kontribusi sebesar 0,67%. Adapun pada tahun 2021 jumlah retribusi pendapatan dari sektor pariwisata sebesar Rp. 614.265.000 dengan kontribusi sebesar 0,31%. Peningkatan terjadi di tahun 2019 -2020 dikarenakan bertambahnya jumlah pengunjung wisata. Sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan, faktor utama penyebab penurunan pendapatan ini ialah masa pandemi covid-19 yang berdampak pada beberapa kali objek wisata di tutup karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah daerah.

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

Dalam perspektif ekonomi Islam, pariwisata merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain itu pariwisata syariah merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana, dan seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotifasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat dari Allah SWT. Maksudnya Islam tidak melarang manusia untuk berwisata atau berlibur tetapi tidak dengan hiburan-hiburan yang dilarang oleh syariat islam.

Menurut Chukaew terdapat beberapa faktor standar pengukuran pariwisata syariah yaitu: (Yudi, 2018, hlm. 64)

- a. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.
- b. Pemandu dan staff harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam.
- c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
- d. Rumah makan harus mengikuti standar internasional pelayanan halal.
- e. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi.
- f. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan.
- g. Tempat wisata tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Mengingat bahwa 96% masyarakat Kabupaten Tanah Laut menganut agama Islam, maka pemerintah tentu menyesuaikan kegiatan pariwisatanya sesuai dengan syariat agama Islam mulai dari kegiatan-kegiatan pariwisata, makanan yang dijual disekitar sektor pariwisata harus halal, namun dari segi pelayanan kepada wisatawan belum semuanya sesuai dengan prinsip islam secara keseluruhan. Dinas Pariwisata selaku pengelola pariwisata mengembangkan sumber daya pariwisata yang ada, sehingga dapat digunakan dan menghindari dari kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan seperti tindak kriminal dan tindakan-tindakan asusila. Selain dari hal tersebut setiap sektor pariwisata dilengkapi dengan musholla sebagai sarana tempat beribadah untuk wisatawan muslim. Namun

dalam hal ini pemerintah belum menyediakan sarana transportasi khusus untuk menuju ke lokasi wisata, hal ini yang sedang diupayakan pemerintah sebagai upaya pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dalam hal pengembangan sektor pariwisata telah menjalankan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam QS.Al-Ahzab/33:72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya : “*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh.*” (Departemen Agama RI., 1971, hlm. 427)

Sedangkan yang dimaksud dalam surah ini adalah tugas kekhalifahan itu tidak lepas begitu saja tanpa diberikan kewenangan-kewenangan untuk mengelola bumi dan seisinya, ini berarti untuk kelancaran tugas tersebut Allah telah siapkan sarana dan prasarana yang lengkap untuk segala profesi.

Pengembangan kapariwisata harus didasarkan pada kriteria berkelanjutan, artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis yang tidak melanggar norma-norma hukum dan ketentuan-ketentuan Allah SWT, dalam mengelola dan memanfaatkan alam sebagian salah satu fasilitas yang disediakan Allah SWT, Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Al-A`raf/7:56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥١﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Departemen Agama RI., 1971, hlm. 157)

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa tugas manusia dimuka bumi ini adalah menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem alam agar tidak rusak dan menyebabkan kerugian bagi seluruh makhluk Allah SWT dibum. Karena itu, tugas ini merupakan tugas tabf berkelanjutan dan berkesinambungan mulai dari menata, merawat, memanfaatkan, dan melestarikan. Keseluruhan tugas yang berkelanjutan serta berkesinambungan tersebut diarahkan untuk kemaslahatan umat.

Dalam pengembangan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut, Dinas pariwisata telah berupaya menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan mulai dari fasilitas, sarana dan juga prasarana. Namun penggunaannya masih belum optimal, maka dari langkah yang diambil oleh Dinas Pariwisata yaitu dengan memabangun fasilitas-fasilitas, khususnya fasilitas pariwisata dan prasarana umum, untuk mendukung pengembangan pariwisata dan meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana umum, guna mendorong pertumbuhan daya saing wilayah pengembangan pariwisata dan untuk menimbulkan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung.

Prinsip-prinsip pengembangan pariwisata menurut Ekonomi Islam ialah aktivitas pengembangan pariwisata diarahkan dengan prinsip *ta'aruf* (pengenalan), *tabadul al manafi* (pertukaran manfaat), dan *ta'awwan* dan *takaful* (saling menolong dan saling menanggung resiko). Oleh karena itu, salah satu misi ilmu kepariwisataan dalam islam adalah menyusun secara ilmiah dan sistematis upaya-upaya untuk memaksimalkan manfaat pariwisata dan meminimalkan dampak negatifnya. (Muhajirin, 2018, hlm. 93)

Adapun penyelenggaraan pariwisata syariah dari sudut pandang Ekonomi Islam telah dipaparkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 penyelenggaraan wajib:

- a. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/israf, dan kemungkaran. Dinas Pariwisata mengupayakan agar setiap pariwisata terhindar kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan seperti tindak kriminal dan tindakan-tindakan asusila
- b. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Manfaat yang diterima masyarakat ialah ekonomi masyarakat akan meningkat. Masyarakat akan bertambah penghasilannya apabila banyak yang berkunjung ke sektor pariwisata tersebut, seperti penghasilan dari para pedagang yang ada di sektor pariwisata, ojek, dan penyedia jasa lainnya seperti sewa payung, banana boat, sewa kapal, dan atv.

Adapun ketentuan-ketentuan destinasi pariwisata yang sesuai dengan sudut pandang ekonomi Islam dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 ketentuannya yakni :

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:

- a) Mewujudkan kemaslahatan umum
- b) Pencerahan, penyegaran dan penenangan
- c) Memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan
- d) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan
- e) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tanah Laut ini dapat mewujudkan kemaslahatan umum, jika sektor pariwisata dikembangkan dan dikelola dengan baik, maka manfaat yang diterima masyarakat disekitar sektor pariwisata ialah akan bertambah penghasilannya apabila banyak yang berkunjung ke sektor pariwisata tersebut. Kemudian para wisatawan yang berkunjung dapat merasakan ketenangan dan kenyamanan dalam menikmati panorama alam yang indah, lalu kenyamanan apabila lingkungan di sektor pariwisata tersebut dalam keadaan bersih, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dalam mengelola sektor pariwisata adalah dengan melengkapi sarana-prasarana seperti adanya tempat sampah diseluruh sektor pariwisata yang ada agar wisatawan yang berkunjung tidak membuang sampah sembarangan, kemudian di sektor pariwisata

juga terdapat beberapa petugas kebersihan. Selanjutnya keamanan, dalam mengelola sektor pariwisata Dinas Pariwisata dinas pariwisata juga bertanggung jawab atas keamanan disektor pariwisata seperti adanya pokdarwis disekitaran pariwisata yang mana pokdarwis ini bertugas menjaga keamanan dilingkungan sektor pariwisata.

2. Destinasi wajib memiliki:

- a) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah
- b) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.

Di Sektor pariwisata di Kabupaten Tanah Laut ini sudah dilengkapi dengan musholla sebagai sarana tempat beribadah untuk wisatawan muslim. Kemudian makanan dan minuman yang dijual disektor pariwisata ini terjamin kehalalannya dapat dilihat dibeberapa kemasan makanan dan minuman tersebut dengan adanya Sertifikat Halal Mui.

3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:

- a) Kemusyrikan dan khurafat
- b) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi
- c) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dinas Pariwisata mengupayakan agar setiap pariwisata terhindar kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan seperti tindak kriminal dan tindakan-tindakan asusila.

Aspek penting dalam pengembangan pariwisata berdasarkan prinsip Islam, mengindikasikan pada jaminan pelaksanaan pariwisata yang nyaman dan berkah serta benar-benar memfungsikan pariwisata sebagai wahana untuk menikmati keindahan alam, menikmati perjalanan, dan menikmati fasilitas yang akan mengantarkan pada kemaslahatan dan jauh dari kerusakan. (Fahrur, 2019, hlm. 108)

Pendapatan dalam Islam sebagaimana telah diketahui yaitu bersumber dari *zakat, kharaj, ghanimah dan fay, jizyah, dan usyr*. Dari hal tersebut sektor pariwisata dapat dikatakan tergolong dalam *kharaj* yaitu pendapatan atas tanah atau hasil bumi, dimana pengelola tanah harus membayar sewa atas tanah tersebut, di Indonesia setara dengan pajak bumi dan bangunan (PBB). Berkaitan dengan pendapatan dalam Islam, Pariwisata di Kabupaten Tanah Laut seharusnya termasuk dalam *kharaj* yang ketentuan sumber pendapatannya jelas dari pendapatan tanah atau hasil bumi. Namun saat ini sumber pendapatan pariwisata di Kabupaten Tanah Laut tidak demikian seperti pendapatan dalam Islam yang sudah ada ketentuannya, melainkan dari sumber lain seperti karcis masuk, sewa kios pedagang dan lahan parkir . Meskipun begitu, pendapat asli daerah (PAD) Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan dan mengalami penurunan dimasa pandemi covid-19.

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Drs. H. M. Rafiqi Effendi, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut menyatakan bahwa pariwisata syariah itu sendiri ialah pariwisata yang konsepnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah yang berhubungan dengan kosep halal dan haram didalam islam. Halal diartikan membenarkan sedangkan haram dilarang. Namun, bapak Drs. H. M. Rafiqi Effendi, M.Si menggaris bawahi belum ada nya pariwisata syariah di Kabupaten Tanah Laut bukan berarti pariwisata tersebut tidak sesuai dengan prinsip islam, hanya saja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut sendiri belum memisahkan antara pariwisata non syariah dan pariwisata syariah. Dan kaitannya pariwisata dengan pendapatan daerah, pariwisata Kabupaten Tanah Laut kontribusinya terhadap pendapatan dalam Islam belum sesuai dengan sumber-sumber yang telah ditentukan melainkan diperoleh dari sumber lain, akan tetapi perolehan dari sumber lain tersebut justru membantu dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Laut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang ada dalam pariwisata syariah dan pariwisata non syariah tidak ada perbedaan, hanya perbedaan nya dalam segi fasilitas yang ada, misalnya adanya musholla sebagai sarana tempat ibadah untuk wisatawan muslim, dan makanan yang dijual disekitaran pariwisata terjamin kehalalannya. Dari segi pendapatan kaitannya dengan pendapatan dalam islam ialah *kharaj* yang ketentuan sumber pendapatannya jelas dari pendapatan tanah atau hasil bumi. Namun saat ini sumber pendapatan pariwisata di Kabupaten Tanah Laut tidak demikian seperti pendapatan dalam Islam yang sudah ada

ketentuannya, melainkan dari sumber lain seperti karcis masuk, sewa kios pedagang dan lahan parkir.